

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues

Implementation of Regulation of the Minister of National Education Number 24 Of 2007 Concerning Standards of Facilities And Infrastructure In SD Negeri 1 Tripe Jaya Gayo Lues District

Said Sala, Isnaini & Adam

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 22 Maret 2022; Direview: 22 Maret 2022; Disetujui: 15 Mei 2022

*Corresponding Email: adam@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Implementasi peraturan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diuji dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya sudah dilaksanakan namun belum optimal: (1) Standar, sasaran dan tujuan kebijakan, masih kurangnya pemahaman secara menyeluruh. (2) Sumber Daya, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan finansial. (3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, belum dibentuknya panduan alur kerja pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. (4) Sikap Para Pelaksana, masih kurangnya pemahaman bagi setiap pelaksana khususnya di sekolah. (5) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan, perlunya pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi berkelanjutan antara sekolah dan Dinas Pendidikan. (6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, perlunya kepedulian lebih dari masyarakat sekitar sekolah serta bantuan dana dan prioritas perhatian dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Implementasi; Standar; Sarana dan Prasarana

Abstract

The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of National Education Number 24 of 2007 concerning Standards for Facilities and Infrastructure at SD Negeri 1 Tripe Jaya, Gayo Lues Regency and to identify and analyze the inhibiting factors for the implementation of the regulation. The research method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, observations, documentation and literature studies. The results of the research that were tested using the theory of Policy Implementation of Donald Van Metter and Carl Van Horn showed that the implementation of the Regulation of the Minister of National Education Number 24 of 2007 concerning Standards for Facilities and Infrastructure at SD Negeri 1 Tripe Jaya had been implemented but not yet optimal: (1) Standards, targets and policy objectives, there is still a lack of comprehensive understanding. (2) Resources, lack of availability of human and financial resources. (3) Characteristics of the Implementing Organization, the workflow guideline for the fulfillment of school facilities and infrastructure has not been established. (4) The attitude of the implementers, there is still a lack of understanding for each implementer, especially in schools. (5) Communication between Related Organizations and Implementation Activities, the need for continuous coordination and socialization between schools and the Education Office. (6) The social, economic and political environment, the need for more concern from the community around the school as well as financial assistance and priority attention from the local government.

Keywords: Implementation; Standard; Facilities and infrastructure

How to Cite: Sala, S., Isnaini, & Adam. (2022) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Di Sd Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(1): 252-263.



PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan meliputi berbagai aspek antara lain aspek hukum, politik, agama, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu aspek yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan nasional adalah aspek pendidikan.

Pada era persaingan global yang terus berkembang seiring ruang dan waktu menuntut pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas yang mampu menjawab tantangan perubahan dan mampu membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendidikan adalah salah satu sistem dalam masyarakat yang mempunyai peran signifikan dalam memberikan solusi alternatif bagi persoalan masyarakat (Husni et al., 2022; Mahdani et al., 2022; Siregar et al., 2019). Kemajuan dalam mengelola pendidikan merupakan indikator dan kemampuan dan komitmen suatu negara dalam menjamin sumber daya manusia, oleh karena itu pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien harus menjadi komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional, regional maupun di tingkat sekolah. Dalam undang-undang tersebut telah diamanatkan tentang standarisasi pendidikan yaitu pada pasal 1 Ayat (17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 35 dikatakan Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala (Saragih et al., 2022; Akromusyuhada, 2019).

Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, pemerintah menetapkan setiap satuan pendidikan wajib memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat (9) bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Indarwan, 2019; Indonesia, 2014).

Sebagai turunan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dalam pelaksanaan kegiatan standarisasi sekolah pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) harus mempunyai lahan dan bangunan gedung yang memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yaitu untuk 6 (enam) rombongan belajar untuk gedung 1 lantai 12,7 m²/peserta didik, gedung dua lantai 7,0 m²/peserta didik dan gedung tiga lantai 4,9 m²/peserta didik dan seterusnya sesuai dengan rombongan belajar dan sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

Setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) bertanggungjawab dalam mengusahakan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan, karena sarana prasarana merupakan faktor baik secara langsung maupun tidak langsung ikut menentukan kelancaran kegiatan pendidikan dan pada gilirannya memudahkan tercapainya tujuan pendidikan pada Madrasah tersebut. Terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung, maka

penyelenggaraan atau pelaksanaan proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitupun sebaiknya dengan lengkapnya sarana dan prasarana akan memberikan makna dan kualitas pada pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Maka Sekolah Dasar wajib memenuhi standar sarana dan prasarana dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (Nim, 2018; Munawarah, 2020).

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki permasalahan dengan pendidikan. Dilihat dari segi pendidikan khususnya Sekolah Dasar, tergolong masih sangat ketinggalan dari segala bidang dari daerah lain, seperti tenaga pengajar, minat sekolah anak dan terutama sarana dan prasarana sehingga dewasa ini masih sering dijumpai Sekolah Dasar yang kondisi sarana dan prasarannya masih memprihatinkan, baik Sekolah Dasar yang ada diperkotaan maupun di daerah pinggiran.. Di Kabupaten Gayo Lues terdapat 103 Sekolah Dasar di bawah Dinas Pendidikan Gayo Lues, dan 11 Madrasah Ibtidaiyah di dibawah naungan Kementerian Agama dan standar sarana dan prasarana ada yang telah memenuhi standar minimum ada juga yang belum. Berdasarkan observasi pra riset peneliti hampir sekitar 60% Sekolah Dasar di Gayo Lues belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Padahal kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sangat membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Sayidina Zahra Amalia (2018) yang berjudul "Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk". Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tujuan Penelitan ini adalah untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan sarana dan prasarana sekolah di MAN Prambon Nganjuk melalui pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tersebut yang mencakup aspek perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Hasil Penlitan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dengan hasil penelitian yang dilakukan di MAN Prambon Nganjuk belum berjalan secara efisien dan efektif karena masih terkendala dengan anggaran dari pemerintah itu sendiri, hal tersebut tampak dalam aspek pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang belum berjalan baik dimana masih banyak kekeurangan perlengkapan/perabotan untuk kegiatan proses belajar mengajar seperti komputer sehingga peserta didik diharuskan untuk membawa komputer sendiri saat proses belajar.

Penelitian Erni Pujiastuti, Andre N Rahmanto, Jumianto Widodo (2018) yang berjudul "Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Negeri 1 Karanganyar". Penelitian ini menggunakan pendekatan desriptif bersifat kualitatif. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri 1 Karanganyar, mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri 1 Karanganyar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam impelementasi manajemen saraa dan prasarana pendidikan di SMK Negei 1 Karanganyar. Hasil penelitian yang dilakukan dalam mengelola sarana dan prasarana SMK Negeri 1 Karanganyar menjalankan 6 fungsi yaitu fngsi perencanaan, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan dan pemeliharaan, fungsi inventarisasi dan fungsi penghapusan sarana dan parasarana pendidikan. Keenam Fungsi tersebut saat ini berjalan optimal karena terdapat hambatan-hambatan antara lain terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan penyimpanan dan inventarisasi, terlalu banyak fungsi manajemen sarana dan prasarana yang dilimpahkan kepada kepala seksi urusan sarana dan prasarana, terbatasnya tempat penyimpanan barang baik untuk tempat barang yang baru dtang maupun barang yang tida layak pakai, pengeluaran barang habis tidak sesuai dengan prosedur. Upaya yang harus dilakuan adalah perekrutan SDM yang berkompten, penatauangan kantor, melakukan pembagian kerja untuk meprecepat administrasi inventarisir dan pembuatan SOP barang keluar.



Penelitian Martinus Tanggela (2013) yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di SMP Negeri 2 Batu". Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah (1) mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu, (2) untuk menggambarkan penggunaan implementasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah kebijakan di SMP Negeri 2 Batu, dan (3) mendeskripsikan pelaksanaan inventarisasi kebijakan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu belum berjalan optimal dimana dalam pemakaian sarana dan prasarana pendidikan belum memiliki SOP dan data belum terintegrasi dengan teknologi digital masih menggunakan metode konvensional dan saat ini belum ada pengelola khusus untuk penggunaan sarana dan prasarana sehingga mengurangi tingkat efektifitas, efisiensi dan produktifitas dari sarana dan prasarana itu sendiri.

Dari penelitian yang dijelaskan di atas, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan rangkuman data penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diungkapkan peneliti di atas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi dan faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas dan kompleks. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori yakni memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang diteliti. Alasan penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Ttripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Ttripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yaitu: Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya; Operator Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya; Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues; Guru SD Negeri 1 Tripe Jaya; Anggota Komite Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya.

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang memiliki



kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu teknik pengumpulan data harus dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian yang akan digunakan.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indepht interview) dengan narasumber (informan) dengan berpedoman pada interview-guidances yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu lanjut usia. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang program pelayanan Dinas Sosial yang langsung dirasakan oleh lanjut usia.

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Gayo Lues.

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005). Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai studi kepustakaan seperti literatur, internet, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006). Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut di Kabupaten Gayo Lues. Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156): Reduksi Data (Data Reduction), Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya; Penyajian Data (Data Display), Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.

Untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues peneliti menggunakan Teori Donald Van Metter Dan Carl Van Horn, seperti yang dikatakan oleh Nugroho (2011) tidak ada model terbaik karena setiap kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dirasa peneliti cukup mewakili permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan dapat dijadikan panduan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

Fenomena yang ditemui dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan alur model milik Van Meter Van Horn. Selain itu, menurut peneliti, model implementasi Van Meter Van Horn ini menawarkan dimensi yang lebih luas dibandingkan model implementasi milik Edward III yang selama ini sering digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang masalah implementasi kebijakan. Model implementasi milik Van Meter Van Horn melihat implementasi bukan hanya dari sisi implementor saja, tetapi juga dari standar, sasaran dan tujuan kebijakan serta lingkungan kebijakan. Beberapa dimensi dari model implementasi milik Edward



III seperti komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi juga dibahas dalam model implementasi milik Van Meter Van Horn, selain itu model ini juga menambahkan dimensi lainnya yaitu standar, sasaran dan tujuan kebijakan serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang dirasa peneliti juga sangat mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk sekolah wilayah yang jauh dari ibukota provinsi maupun kabupaten/kota seperti di SD Negeri 1 Tripe Jaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues

1. Standar, sasaran dan tujuan kebijakan.

Indikator yang pertama yaitu standar, sasaran dan tujuan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. Sesuai dengan pendapat Van Meter Dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Kurniawan & Maani (2019) menjelaskan jika untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Kejelasan standar dan tujuan kebijakan. Yaitu standar dan sasaran kebijakan harus jelas. Apabila standar sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Standar dan tujuan kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. *Implementors* mungkin menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan, dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya menjelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya sudah menyesuaikan dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Berkaitan dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana sekolah, terdapat acuan atau aturan yang juga digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bangunan sekolah yaitu Peraturan Menteri PUPR seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bapak Hasan Basri, SE, MM.

Di sisi lain kejelasan tentang standar Sarana dan Prasarana belum banyak diketahui oleh pelaksana di SD Negeri 1 Tripe Jaya, tetapi pelaksana sudah mengetahui tujuan dari pemenuhan sarana dan prasarana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Operator Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya, Bapak Ramli. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Guru Kelas SD Negeri 1 Tripe Jaya, Ibu Sawidah dan Ketua Komite Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya, Bapak M. Jaksu.

Ketercapaian standar dan sasaran kebijakan. Meskipun aturan tentang standar sarana dan prasarana sudah sebahagian dipahami oleh pelaksana baik di SD Negeri 1 Tripe Jaya dan pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, namun dalam pelaksanaan ketercapaian sasaran dari Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 belum seluruhnya dapat dipenuhi, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bapak Hasan Basri, SE, MM. Pernyataan Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues diperkuat oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya, Bapak Zulkarnain, S.Pd. Menurut Guru Kelas SD Negeri 1 Tripe Jaya, Ibu Sawidah. Pernyataan belum terpenuhinya ketercapaian tujuan standar sarana dan prasarana juga disampaikan oleh Operator Sekolah, Bapak Ramli. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksana baik di SD Negeri 1 Tripe Jaya maupun Dinas Pendidikan belum seluruhnya mengetahui informasi tentang standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sekolah dasar untuk menunjang proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan, tetapi sudah memahami tujuan dengan adanya standar sarana dan prasarana akan meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa ketercapaian dari tujuan standar, sasaran dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang termuat dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 1 Tripe jaya terlihat pelaksana sudah mulai berbenah untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah seperti sudah adanya pembangunan baru gedung kantor guru dan kepala sekolah, adanya pembangunan mushola dan adanya perbaikan kamar mandi siswa.

2. Sumber Daya.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya dan sumber daya tersebut dapat diukur dari segi kecukupan, kesesuaian dan kejelasan. Sebagaimana yang dikutip dari Kurniawan & Maani (2019) Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Subarsono (2011:100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human recouces*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human recources*). Keberhasilan dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues ditentukan oleh beberapa unsur.

Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia adalah sumber utama dalam implementasi kebijakan. Meskipun standar, sasaran dan tujuan kebijakan telah dipahami dengan jelas tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya, Bapak Zulkarnain S.Pd, Pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya juga diperkuat oleh ibu Sawidah Selaku Guru kelas di SD Negeri 1 Tripe Jaya. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak Ramli selaku Operator di SD Negeri 1 Tripe Jaya. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komite Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya, Bapak M. Jaks. Sementara itu untuk sumber daya manusia pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues dinilai telah sesuai dalam melaksanakan kegiatan standar sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bapak Hasan Basri, SE, MM

Selain jumlah staf pelaksana yang tersedia, sumber daya manusia sebagai implementator kegiatan juga berkaitan tentang kompetensi dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Informasi yang diperoleh peneliti bahwa kompetensi pelaksana di SD Negeri 1 Tripe Jaya juga dinilai masih kurang memadai dikarenakan peningkatan kompetensi belum dilaksanakan. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Bapak Hasan Basri, SE, MM, Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana diperkuat oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya Bapak Zulkarnain, S.Pd. Pernyataan senada yang berkaitan dengan rendahnya pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi pelaksana disampaikan oleh Operator Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya Bapak Ramli.

Sumber Daya Finansial. Di luar sumber daya manusia, sumber daya – sumber daya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumber daya finansial. Dikutip dari Putra (2014) menjelaskan jika sumber daya finansial menjadi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program. Pernyataan tentang masih minimnya sumber daya finansial dalam pelaksanaan implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana.

Sumber Daya Kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari dana atau intensif yang dapat memperlancar pelaksanaan. Kurang atau terbatasnya dana atau intensif dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa sumber daya kebijakan yang berkaitan dengan intensif pelaksana juga belum memadai.

Masih terdapat banyak kendala dalam sumber daya manusia pelaksana kegiatan seperti jumlah staf pelaksana yang kurang secara kuantitas sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan pada satu orang dan rendahnya kompetensi pelaksana karena tidak adanya pelatihan dan pendidikan khusus yang dilaksanakan tampak pada saat observasi, pencatatan pada struktur organisasi di SD Negeri 1 Tripe Jaya terdapat beberapa guru merangkap pekerjaan lainnya seperti menjadi operator sekolah maupun merngkap tugas lainnya

Dalam hal sumber daya finansial dan sumber daya kebijakan baik di SD Negeri 1 Tripe Jaya maupun pada Dinas Pendidikan juga masih terdapat kendala yaitu minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan masih minimnya intensif yang diberikan kepada pelaksana kegiatan. Dari hasil observasi dokumen DPA yang dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan juga tampak adanya pengurangan anggaran Dinas pendidikan dari tahun sebelumnya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Purnamasari & Pradana (2017) menjelaskan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan aturan, serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan karena organisasi perlu adanya peta untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan secara umum dan status dari berbagai bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya. Garis-garis dari berbagai bingkai untuk menunjukkan interaksi yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan. Struktur birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah tapi juga dalam organisasi swasta, institusi dan sebagainya. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 di SD Negeri 1 Tripe Jaya sudah didapati adanya struktur birokrasi sebagai acuan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana sehingga masing-masing pelaksana dapat melaksanakan tugasnya tetapi karena pembagian tersebut baru dilaksanakan saat ini sehingga pelaksana masih kurang memahami tugas dan fungsinya.

Norma-norma atau Aturan Pelaksanaan Kebijakan. Dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya tentunya harus ada norma-norma yang harus diperhatikan dan dijalankan seluruh pelaksana kebijakan. Norma aturan tersebut telah ditentukan melalui standar dan mekanisme atau SOP (Standar Operasional Prosedur). Adanya Standar Operasional Prosedur yang mengatur tata alur pekerjaan akan memberikan keseragaman dalam tindakan pelaksana dalam organisasi, dalam hal ini SD Negeri 1 Tripe Jaya belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan maupun pengelolaan standar sarana dan prasarana.

Pola hubungan/Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor atau badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu maka semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, sehingga semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Penyebaran tanggung jawab pada suatu kebijakan akan menyebabkan koordinasi akan menjadi sulit sehingga perlu adanya pemusatan koordinasi.

Untuk pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya penyebaran tanggung jawab/fragmentasi pemenuhan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues secara langsung maupun pada SD Negeri 1 Tripe Jaya, adapun Komite sekolah yang juga bertanggungjawab terhadap peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut tetap koordinasinya terpusat di SD Negeri 1 Tripe Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara tentang faktor karakteristik organisasi pelaksana dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 1 Tripe Jaya belum memenuhi karakteristik organisasi pelaksana dengan maksimal dimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belum ada Standar Operasional yang memuat rincian tugas dan fungsi secara jelas dari pelaksana kegiatan di sekolah bahkan di tingkat lebih tinggi yaitu di Dinas Pendidikan juga belum memiliki SOP. Pembagian tugas kepada guru maupun staf lainnya saat ini sudah dilaksanakan tetapi masih sangat baru. Di sisi lain fragmentasi tanggung jawab implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24



tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pada dasarnya sudah termuat dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana seperti pada Kepala sekolah, operator sekolah, komite sekolah maupun Dinas Pendidikan. Hasil observasi peneliti di sekolah bahwa memang belum terdapat dokumen SOP tentang pembagian tugas di SD Negeri 1 Tripe Jaya maupun pada Dinas Pendidikan.

4. Sikap Para Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementatornya. Jika ada beda pandangan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van meter dan van horn yang dikutip dari Widodo, (2010) menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana ini ingin berhasil, Kadji (2015:55) mengungkapkan bahwa harus memperhatikan sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap kebijakan dengan melihat elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Pemahaman Tentang Kebijakan. Pemahaman kebijakan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami tentang suatu kebijakan yang dibuat. Pemahaman tentang kebijakan penting dimiliki oleh pelaksana kegiatan untuk dapat memenuhi standar capaian kegiatan yang dilaksanakan. Hasil wawancara peneliti diketahui bahwa pemahaman tentang kebijakan ini belum semua dimiliki oleh pelaksana di SD Negeri 1 Tripe Jaya, pemahaman tentang sarana dan prasarana masih pada tataran Kepala sekolah maupun operator sekolah.

Tanggapan Kebijakan. Adanya aturan tentang standar sarana dan prasarana mendapatkan dukungan dari pelaksana di SD Negeri 1 Tripe Jaya. Pelaksana menjelaskan bahwa mereka mendukung penuh aturan tentang standar sarana dan prasarana tersebut, karena menyadari betul manfaat yang akan diterima baik untuk pendidik maupun peserta didik yang berada dalam satu kesepahaman yakni meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Tripe Jaya.

Intensitas Tanggapan. Adanya tanggapan yang positif dari pelaksana terhadap kebijakan standar sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya terlihat dari tindakan pelaksana. Pelaksana di SD Negeri 1 Tripe Jaya belum semua memahami tentang peraturan menteri pendidikan nasional tentang sarana dan prasarana, walaupun belum memahami tentang standar yang ada tetapi pelaksana menyadari betul manfaat dari pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Hasil observasi peneliti tampak bahwa pelaksana baik kepala sekolah, dewan guru maupun komite sekolah sangat antusias dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya terlihat dari keterlibatan Komite sekolah dalam kegiatan gotong royong dalam memperbaiki kursi yang rusak.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan. Menurut M. Sobry Sutikno (Ihsana El Khuluqo, 2017: 96) komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan/informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantaranya. Dapat disimpulkan pengertian komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan agar pesan itu diterima dengan baik untuk dapat di implementasikan. Faktor komunikasi ini dapat dilihat dari kejelasan/ ketepatan informasi dan konsistensi informasi yang diberikan.

Dikutip dari Purnamasari & Pradana (2017) Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan informasi ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak (Zulfian, 2014). Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan komunikasi, padahal

implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten.

Ketepatan/Kejelasan Informasi. Berkaitan dengan ketepatan atau kejelasan informasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, disampaikan bahwa informasi tentang peraturan tersebut belum diketahui secara jelas oleh pelaksana di SD Negeri 1 Tripe Jaya.

Konsistensi Informasi. Konsistensi Informasi yang disampaikan yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Konsistensi informasi dapat berupa pelaksanaan koordinasi maupun sosialisasi yang dilaksanakan secara kontiniu/berkelanjutan.

Pelaksanaan komunikasi sudah dilakukan oleh Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya melalui pelaksanaan koordinasi, dan sosialisasi tetapi pelaksanaan komunikasi yang dilakukan juga mengalami beberapa kendala seperti tidak terlaksananya kegiatan koordinasi dan sosialisasi secara kontiniu/berkelanjutan, sosialisasi dan koordinasi juga baru dilakukan 1 (satu) kali sehingga informasi terkait sarana dan prasarana belum dipahami oleh pelaksana.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn sebagaimana yang dikutip dari Agustino (2012) mengatakan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal.

Lingkungan Sosial. Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat. Dalam penelitian ini adalah komite sekolah yang merupakan unsur yang terdiri dari orang tua siswa dan masyarakat yang ada di lingkungan SD Negeri 1 Tripe Jaya. Dalam hal pemenuhan standar sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Jaya sendiri Komite Sekolah sangat antusias dan mendukung sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Lingkungan Ekonomi. Dalam penelitian ini lingkungan ekonomi adalah lingkungan ekonomi masyarakat sekitar yang dapat membantu dalam meningkatkan sarana dan prasarana SD Negeri 1 Tripe Jaya maupun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues. Secara ekonomi masyarakat belum banyak berkontribusi dalam upaya meningkatkan prasarana dan prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya.

Lingkungan Politik. Yang menjadi unsur politik dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas pendidikan, maupun BAPPEDA dalam sistem penganggaran untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Gayo Lues.

Adanya pengaruh lingkungan sosial, ekonomi maupun politik terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dimana, lingkungan sosial dari masyarakat dalam hal ini komite sekolah dan masyarakat sekitar SD Negeri 1 Tripe Jaya cukup berperan aktif dalam menunjang sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya, tampak pada saat observasi saat ini sudah tersedia air disekolah melalui sumbangan dari komite sekolah dan masyarakat sekitar.

Dari segi lingkungan ekonomi kondisi anggaran yang tersedia saat ini belum mendukung pemenuhan standar sarana dan prasarana dikarenakan adanya penurunan anggaran secara global di daerah maupun di pemerintah pusat, hasil observasi peneliti lapangan saat ini SD Negeri 1 Tripe Jaya belum memiliki Laboratorium dan Ruang UKS, selama ini Laboratorium praktik masih menumpang dengan sekolah lain.

Sedangkan dari segi politik dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana sudah terlaksana dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah konsisten dalam pemenuhan sarana

dan prasarana mengacu pada aturan 20% dana APBN /APBD diperuntukkan untuk pemenuhan kulaitas pendidikan dan sarana dan prasarana sekolah.

Faktor Penghambat Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Di SD Negeri 1 Tripe Jaya

Aspek Sumber Daya: Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan sehingga tidak ada pelaksana khusus yang menangani sarana dan prasarana disekolah sehingga sering terjadi tumpang tindih pekerjaan; Kompetensi Sumber Daya Manusia yang rendah karena minimnya/tidak adanya pelaksanaan peningkatan kompetensi (*capacity building*) bagi pelaksana seperti untuk operator sekolah; Minimnya anggaran dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana sekolah, bahkan saat ini turun hingga 50% dari tahun sebelumnya; Insentif bagi pelaksana kegiatan masih minim karena harus menyesuaikan dengan kemampuan sekolah, bahkan di Dinas Pendidikan belum ada dana tersedia secara khusus untuk pelaksana.

Aspek Struktur Birokrasi Pelaksana: Pembagian tugas masing-masing pelaksana masih baru dilaksanakan. Selama ini belum ada pembagian tugas yang dilakukan; Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana; Aspek Komunikasi Antar Organisasi; Minimnya koordinasi yang dilaksanakan antara pelaksana kegiatan; Minimnya sosialisasi tentang standar sarana dan prasarana yang dilaksanakan dan sosialisasi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sikap Para Pelaksana: Pemahaman tentang kebijakan standar sarana dan prasarana belum dimiliki oleh semua pelaksana baik itu dewan guru maupun komite sekolah.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya telah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis menggunakan Teori Implementasi Donal Van Metter dan Carl Van Horn, bahwa Standar, sasaran dan tujuan kebijakan, Pelaksana kegiatan yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tripe Jaya dan Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues sudah mengetahui informasi tentang Standar Sarana dan Prasarana yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan disekolah, tetapi dari segi ketercapaian tujuan sasaran kegiatan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Faktor Penghambatnya adalah Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia; Pembagian tugas masing-masing pelaksana masih baru dilaksanakan dan Pemahaman tentang kebijakan standar sarana dan prasarana belum dimiliki oleh semua pelaksana baik itu dewan guru maupun komite sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
- Akromusyuhada, A. (2019). Penerapan konsep arsitektur islam pada sarana dan prasarana pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 41-48.
- Amalia, S.Z., (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 17-24.
- Creswell. W.J, (2006). *Research Desain Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Husni, A., Isnaini, I., & Adam, A. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan. *PERSPEKTIF*, 11(2), 786-796. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6297>
- Indarwan, I. (2019). Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada MTs Al-Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang. *Studia Manageria*, 1(2), 149-164.
- Indonesia, P. N. R. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group



- Mahdani, S., Mardiana, S., & Siregar, N. (2022). Implementasi Peraturan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *PERSPEKTIF*, 11(2), 797-808. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6331>
- Munawarah, S. (2020). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu* (Doctoral dissertation, STAI Auliaurasyididn Tembilahan).
- NIM, W. (2018). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA (Studi pada SD Negeri 21 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya). *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(3).
- Pujiastuti, E., Rahmanto, A.N., & Widodo, J. (2018). Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Negeri 1 Karanganyar. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 2(1), 60-70
- Saragih, S., Warjio, W., & Adam, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2369-2378. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1079>
- Siregar, I.H, Kadir, A. & Muda, I. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan*. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 15-19.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Van Meter, D. & Van Horn, C. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conseptual Framework*. Administration and Society.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayu Media Publishing
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)